



**PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DAN
DIGITALISASI PELAPORAN KEUANGAN DESA TERHADAP
*SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGs) DESA***

(Studi Kasus Kecamatan Wagir Kabupaten Malang)

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh :

Windi Qiroatul Afrilia

22001082006



UNIVERSITAS ISLAM MALANG

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

2024



ABSTRAKSI

Sustainable Development Goals (SDGs) desa merupakan hal terpenting dalam suatu desa, karena *Sustainable Development Goals (SDGs)* desa merupakan gambaran bentuk dari kemajuan suatu desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa dan digitalisasi pelaporan dana desa terhadap *Sustainable Development Goals (SDGs)* desa pada Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang meliputi analisis statistik deskriptif, uji instrumental (uji validitas dan uji reliabilitas), uji normalitas, uji asumsi klasik (uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas) dan uji hipotesis (analisis regresi linier berganda, uji F, uji koefisien determinasi dan uji t). Hasil penelitian ini menyatakan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap *Sustainable Development Goals (SDGs)* desa dan digitalisasi pelaporan keuangan desa tidak berpengaruh signifikan terhadap *Sustainable Development Goals (SDGs)* desa.

Kata Kunci : Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Digitalisasi Pelaporan Keuangan Desa dan *Sustainable Development Goals (SDGs)* desa.

ABSTRACTION

Village Sustainable Development Goals (SDGs) are the most important thing in a village, because village Sustainable Development Goals (SDGs) are a description of the progress of a village. This research aims to determine the effect of accountability in village fund management and digitalization of village fund reporting on village Sustainable Development Goals (SDGs) in Wagir District, Malang Regency. The data collection technique used in this research was by distributing questionnaires. The data analysis method used is a quantitative approach which includes descriptive statistical analysis, instrumental testing (validity test and reliability test), normality test, classical assumption test (multicollinearity test and heteroscedasticity test) and hypothesis testing (multiple linear regression analysis, F test, test coefficient of determination and t test). The results of this research state that accountability in village fund management has a significant effect on village Sustainable Development Goals (SDGs) and digitalization of village financial reporting does not have a significant effect on village Sustainable Development Goals (SDGs).

Keywords: *Accountability of Village Fund Management, Digitalization of Village Financial Reporting and Village Sustainable Development Goals (SDGs).*

BAB I

LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang Penelitian

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan sebuah Negara yang terdiri dari wilayah tingkat provinsi, wilayah tingkat kabupaten/kota, wilayah tingkat kecamatan dan wilayah tingkat kelurahan yang terdiri dari berbagai desa. Desa merupakan komponen fundamental bagi pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang merupakan batas yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan kemasyarakatan. Menurut UU Nomor 66 tahun 2014 Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Desa mempunyai fungsi vital sebagai unit organisasi pemerintah yang berhubungan langsung dengan masyarakat yang berbeda latar belakang dan kebutuhannya. Desa diberi wewenang untuk melestarikan budaya masyarakat setempat, pembangunan infrastruktur dan pembangunan yang mengawali peran partisipatif yang besar dalam menggali potensi desa dengan mendorong tata kelola desa yang efektif, transparan, dan akuntabilitas didalam menjalankan kegiatan di desa untuk memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat yang pada akhirnya memberikan kesejahteraan bersama dan menempatkan desa sebagai subjek pembangunan.

Adha (2022) pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat sesuai dengan kondisi sosial, budaya dan keuangan desa. Pemerintah desa diharapkan dapat membantu meningkatkan pembangunan jangka panjang dan pembiayaan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dalam perundang-undangan desa menerangkan bahwa tujuan pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi desa, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Untuk menciptakan desa yang sejahtera dan maju dibutuhkan terwujudnya *Sustainable Development Goals (SDGs)* desa. *Sustainable Development Goals (SDGs)* desa merupakan upaya untuk mencapai *SDGs* Nasional yang diprioritaskan. Menurut (Alfa,2019) *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa merupakan rencana untuk periode 2016-2030 untuk melanjutkan program-program pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan dan gizi, serta tujuan tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial, dan lingkungan. *Sustainable Development Goals (SDGs)* Desa memuat 18 Tujuan dan 169 Target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Dalam program *Sustainable Development Goals (SDGs)* ini akan menciptakan masyarakat yang lebih damai, inklusif dan sejahtera. *Sustainable Development Goals (SDGs)* tidak hanya mencangkup mengenai tujuan pembangunan dan target pencapaian, tetapi juga mengenai cara pelaksanaan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan

meliputi kebijakan, pendanaan, teknologi dan peningkatan kapasitas, serta kesediaan data untuk memastikan tercapainya semua tujuan.

Sustainable Development Goals (SDGs) desa diwujudkan dengan menggunakan anggaran dari pemerintah yaitu dana desa. Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah telah menyiapkan peraturan untuk memastikan dana besar yang diberikan pemerintah kepada masyarakat dikelola dan dipertanggungjawabkan dengan baik. Hal itu dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 2014 Tentang Pengelolaan Dana Desa. Transparansi, akuntabilitas, dan ketertiban harus mendasari seluruh sistem pengelolaan dana desa. Diperlukan pengawasan dalam pelaksanaan *Sustainable Development Goals (SDGs)* desa agar tujuan-tujuan yang sudah direncanakan tercapai secara maksimal, diperlukannya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Seperti yang dilakukan peneliti terdahulu menerangkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* tidak hanya mencakup tentang perekonomian tetapi juga tentang teknologi.

Dalam era globalisasi saat ini sangat berdampak pada teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia, semua hal dapat dilakukan dengan mudah dengan adanya digitalisasi. *Sustainable Development Goals (SDGs)* desa juga mencakup

peningkatan teknologi seperti digitalisasi, digitalisasi merupakan proses alih media dari bentuk tercetak menjadi bentuk digital, termasuk dalam bidang akuntansi seperti pelaporan keuangan. Digitalisasi pelaporan keuangan desa merupakan upaya menghilangkan penggunaan kertas. Selain menurunkan penggunaan kertas digitalisasi pelaporan keuangan juga diyakini bahwa dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pengawasan penggunaan dana desa serta dapat membantu meningkatkan tujuan pembangunan berkelanjutan desa. Melalui digitalisasi pelaporan keuangan desa ini merupakan bentuk kepedulian terhadap lingkungan seperti pengurangan penggunaan kertas, mengurangi sampah kertas, menjaga kebersihan lingkungan dan juga mengurangi biaya operasional.

Digitalisasi pelaporan keuangan desa ini dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas kinerja pemerintah desa dalam memberikan berbagai pelayanan kepada masyarakat secara tepat, mudah, efektif, efisien dan transparan dengan memberikan akses informasi kepada masyarakat, dalam penggunaan dan pengelolaan keuangan dana desa secara luas untuk mencapai tujuan penyelenggaraan pemerintah yang lebih akuntabel. Digitalisasi pelaporan keuangan desa bertujuan untuk memantau secara langsung kemajuan desa dalam pengalokasian dana dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai akuntabilitas pengelolaan dana desa. Digitalisasi pengelolaan dana desa dengan mekanisme open data sebagai bentuk pengembangan sistem informasi keuangan desa yang dimungkinkan dengan adanya open data keuangan desa (Handayani et al., 2023).

Mardiasmo (2018) digitalisasi pelaporan keuangan desa diperlukan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa, serta dapat memudahkan evaluasi dan pengawasan keuangan desa. Dengan adanya digitalisasi pelaporan keuangan desa ini dapat membantu mewujudkan *Sustainable Development Goals (SDGs)* desa selain digitalisasi pelaporan keuangan desa juga dibutuhkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Handayani et al. (2023) pengelolaan keuangan desa harus dilaksanakan berdasarkan gagasan akuntabilitas, yaitu pemerintah harus mampu mempertanggungjawabkan kewenangan yang dimilikinya terhadap pihak-pihak yang menyusun anggaran. Konsep akuntabilitas dalam kegiatan pengelola keuangan desa meliputi tertib operasional dan disiplin anggaran, transparansi dan ketertiban. Akuntabilitas merupakan salah satu aspek dalam tata kelola laporan keuangan dana desa, yang menuntut pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan kegiatan pada pemerintah pusat dan masyarakat. Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pengendali organisasi sektor publik sehingga organisasi sebagai landasan untuk memberi penjelasan dari pihak internal maupun eksternal yang memiliki kepentingan. Akuntabilitas yaitu bentuk kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dalam menerangkan kinerja serta tindakan seseorang atau badan hukum pimpinan suatu organisasi pada pihak yang memiliki hak serta wewenang untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban (Isnayanti et al., 2019).

Dalam pasal 7 Undang-Undang No.28 Tahun 1999 menjelaskan bahwa setiap kegiatan dan hasil dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas merupakan kemampuan memberi jawaban kepada otoritas yang lebih tinggi atas tindakan suatu kelompok atau organisasi.

Undang-undang yang mengatur tentang akuntabilitas sektor publik telah mengalami perubahan mendasar dengan penekanan pada peranan sistem akuntansi dalam pengukuran dan pengevaluasian baik kinerja keuangan maupun pelayanan, dan pengkomunikasian hasil kepada stakeholders. Keberhasilan akuntabilitas pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya, namun dalam pelaksanaannya sangat bergantung pada bagaimana pemerintah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan dana desa serta partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan program dan responsive aspirasi yang berkembang di masyarakat. Dengan demikian tingkat akuntabilitas didalam pengelolaan dana desa yang telah membuka ruang bagi warga masyarakat untuk terlibat dalam penyelenggaraan pengawasan pembangunan yang transparan dan akuntabel.

Dalam mewujudkan pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)* desa dibutuhkan pengawasan agar tercapai secara maksimal. Digitalisasi pelaporan

keuangan desa dan akuntabilitas pengelolaan desa digunakan untuk meminimalisir kecurangan dan membantu masyarakat untuk mengawasi pengelolaan dana desa agar tercipta desa yang maju dan masyarakat yang sejahtera. Bahwa setiap kebijakan yang telah diberikan oleh pemerintah desa akan memberikan dampak yang lebih baik dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa dan memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi penggunaan dan pengelolaan keuangan dana desa serta dapat mengawasi alokasi dana desa dalam *Sustainable Development Goals (SDGs)* desa.

Dalam penelitian Handayani et al. (2023) dengan judul *Environment Concern Through Digitalization of Village Financial Reporting and Accountability of Village Fund Management: Can it Accelerate the Achievement of Village Sustainable Development Goals (SDGs)?* menghasilkan data bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa dan digitalisasi pelaporan keuangan desa mempunyai dampak besar terhadap kemajuan pencapaian *SDGs* desa. Akan tetapi sangat terbatas penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa dan digitalisasi pelaporan dana desa terhadap pencapaian *SDGs* Desa, serta sangat terbatasnya penelitian mengenai *SDGs* desa dengan menggunakan kuantitatif.

Berdasarkan hal tersebut maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul

“PENGARUH AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DAN DIGITALISASI PELAPORAN KEUANGAN DESA TERHADAP *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS (SDGS) DESA*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitin ini adalah sebagai berikut ;

1. Apakah akuntabilitas pengelolaan dana desa dan digitalisasi pelaporan keuangan desa berpengaruh terhadap *Sustainable Development Goals (SDGs)* desa ?
2. Apakah akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh terhadap *Sustainable Development Goals (SDGs)* desa?
3. Apakah digitalisasi pelaporan keuangan desa berpengaruh terhadap *Sustainable Development Goals (SDGs)* desa?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah tersebut, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk melakukan pengujian secara empiris bahwa ;

1. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa dan digitalisasi pelaporan keuangan desa terhadap *Sustainable Development Goals (SDGs)* desa

2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa terhadap *Sustainable Development Goals (SDGs)* desa
3. Untuk mengetahui pengaruh digitalisasi pelaporan keuangan desa terhadap *Sustainable Development Goals (SDGs)* desa

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat bagi semua pihak yang berkaitan dengan penelitian ini, adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut ini:

1. Bagi Pemerintah Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pemerintah desa sebagai gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan dana desa dan *Sustainable Development Goals (SDGs)* desa.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini sebagai tambahan referensi untuk mengembangkan dan menambah ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi.

3. Bagi Masyarakat Desa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat desa mengenai pelaporan keuangan desa serta pengelolaan dana desa sehingga masyarakat dapat berpartisipasi dalam tujuan pembangunan berkelanjutan desa.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh akuntabilitas pengelolaan dana desa dan digitalisasi pelaporan keuangan desa terhadap *Sustainable Development Goals (SDGs)* desa. Pengujian pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 60 responden.

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara simultan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa dan digitalisasi pelaporan keuangan desa berpengaruh terhadap *Sustainable Development Goals (SDGs)* desa.
2. Variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa berpengaruh signifikan terhadap *Sustainable Development Goals (SDGs)* desa.
3. Variabel digitalisasi pelaporan keuangan desa tidak berpengaruh signifikan terhadap *Sustainable Development Goals (SDGs)* desa.
4. Manfaat bagi pemerintah desa sebagai gambaran mengenai kondisi pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan dana desa dan pelaporan keuangan dalam pencapaian target termasuk pencapaian *Sustainable*

Development Goals (SDGs) desa. Dapat dijadikan suatu bentuk gambaran evaluasi sehingga desa semakin berkembang.

5.2 Keterbatasan

Penelitian ini telah dilakukan dengan prosedur ilmiah, namun masih terdapat keterbatasan diantaranya sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan data yang dilakukan hanya melalui pengumpulan kuesioner, adapun keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu tidak mampu memberikan informasi yang lebih mendalam yang bisa didapatkan dari setiap responden.
2. Dalam penelitian ini akses untuk penyebaran kuesioner pada perangkat desa di Kecamatan Wagir terbatas, sehingga saat melakukan penelitian sedikit terhambat.
3. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen yaitu akuntabilitas pengelolaan dana desa dan digitalisasi pelaporan keuangan desa. Masih terdapat beberapa variabel independen lain yang mampu menjelaskan dan kemungkinan memiliki pengaruh terhadap *Sustainable Development Goals (SDGs)* desa.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan simpulan, dan keterbatasan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti dapat menyampaikan saran sebagai bahan evaluasi sebagai berikut:

1. Bagi peneliti selanjutnya diharankan dapat menambahkan responden sehingga responden bukan hanya desa di Kecamatan Wagir kabupaten Malang.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel lain seperti, transparansi pengelolaan dana desa, kebijakan desa, pengelolaan alokasi dana desa dan lain sebagainya yang mungkin dapat mempengaruhi *Sustainable Development Goals (SDGs)* desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Adha, F. (2022). *Pengelolaan Dana Desa Dalam Mewujudkan Sdgs Didesa Hulu Kecamatan Tapaktuan Kabupaten Aceh Selatan*. 1–85.
- Alfa, A. (2019). Analisis Keselarasan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (Tpb/Sdgs) Dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2016-2021. *Jurnal Bappeda*, 5, 23–32.
- Anwar, K., & Bakhri, S. (2021). Digitalisasi Laporan Keuangan Desa untuk Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*.
- Artisa, Ri. A., & Kurniawan, M. R. (2023). Strategi Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Sustainable Development Goals (Sdgs) Desa. Studi Kasus: Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. *Inovasi Pembangunan : Jurnal Kelitbangan*, 11(01), 61. <https://doi.org/10.35450/jip.v11i01.349>
- Asnawawi, & Maskhuri. (2011). *Metodologi Riset Pemasaran*. UIN Maliki Press.
- Damayanti, R. (2019). Digitalisasi laporan keuangan desa dalam meningkatkan transparansi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*.
- Febriani, R., & Samudra, S. (2023). Implementasi Sustainable Development Goals (Sdgs) Desa Sebagai Upaya Menuju Kemandirian Desa Kotarindau. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 367. <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1.8518>
- Ghozali, I. (2009). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Peneliti Universitas Diponegoro.
- Handayani, B. D., Ismiyati, I., & Astuti, D. P. (2023). Environment Concern Through

Digitalization of Village Financial Reporting and Accountability of Village Fund Management: Can it Accelerate the Achievement of Village Sustainable Development Goals (SDGs)? *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1248(1). <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1248/1/012030>

Isnayanti, K., Maherni, L. B. S., & Irayani, M. P. (2019). DAMPAK AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA TERHADAP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi kasus Desa Jagaraga). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 7(2), 109–121. <https://doi.org/10.23887/jinah.v7i2.19961>

Khasanah, A. N., & Marisan, I. (2022). Pengaruh Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD), Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Pada Desa Jambu Kecamatan Mlonggo Kabupaten Jepara). *Jurnal Rekognisi Akuntansi*, 6(1), 32–48. <https://doi.org/10.34001/jra.v6i1.189>

Mardiasmo. (2002). *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Andi Offset.

Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Terbaru*. CV. Andi Offset.

Pramudya, A., & Ambara, R. (2018). Era Digital dan Tantangannya. *Jurnal Sistem Informasi*.

Pratama. (2020). Digitalisasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*.

Rahmawati, A. D. (2020). Digitalisasi Laporan keuangan Desa Dalam Meningkatkan Transparansi Tata Kelola Desa. *Jurnal Ilmu Sosial*.

Rosul. (2002). *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Detail Rekod.

Safrizal. (2018). Digitalisasi Laporan Keuangan Desa: Tantangan dan Peluang. *Jurnal Ilmiah Hukum Administrasi Negara*.

- Sari, A. N., & Wahidahwati. (2018). Pengaruh penggunaan ADD, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa terhadap kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(2), 1–19.
- Sengaji, I., & Asyik, N. F. (2018). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (Add) Dan Kebijakan Desa Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Ekonomi Asia*, 10(2), 26–32. <https://doi.org/10.32812/jibeka.v10i2.70>
- Sholihin, D. (2007). *Penerapan Good Governance di Sektor Publik untuk Meningkatkan Kinerja Lembaga Publik*. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Sinarwati, N. K., Sujana, E., Kertiasih, N. K., & Insani, I. Al. (2023). Digitalisasi Badan Usaha Milik Desa Dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata. *Prosiding Seminar ...*, 548–556. <https://unars.ac.id/ojs/index.php/prosidingSDGs/article/view/3429>
- Sugista, R. A. (2017). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Terhadap Pembangunan Desa. *Jurnal Sosiologi*, 01, 18.
- Sugiyono. (2019). *Metode Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Edisi 2). Alfabeta.
- Tiasih, A. Y. (2023). Akuntabilitas Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Harapan Desa Sidakaton Untuk Mencapai Program Sustainable Development Goals”. *IAIN Syekh Nurhajati*. <http://repository.syekhnurjati.ac.id/id/eprint/11564>
- Wibowo, M. I. S. S., & Aprina, H. N. (2022). Pengelolaan Keuangan BUMDes: Upaya Mewujudkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Desa. *Universitas Pancasila*, Vol 9 No. <https://doi.org/https://doi.org/10.35838/jrap.2022.009.01.05>

Wicaksono, A. P. N. (2023). Eksplorasi Sustainable Development Goals (SDGs) Disclosure Di Indonesia. *Jurnal Akademi Akuntansi (JJA)*, Vol. 6. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/jaa.v6i1.26448>

